

Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris

Agus Suman

Staf Pengajar fakultas ekonomi Universitas Brawijaya,
Jl. M.T. Haryono 165, Malang 65145
Email: agussuman@yahoo.com

ABSTRAK

Studi ini mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Propinsi Jawa Timur. Program itu bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Ditemukan bahwa PPK sudah mengenai sasarannya, yaitu kecamatan miskin. Ketepatan sasaran itu diukur dari kondisi fisik rumah responden yang ternyata berhubungan positif dengan pendapatan responden. Ini berarti semakin rendah pendapatan responden, the semakin buruk kondisi fisik rumahnya. Pada tingkat mikro, PPK--dengan kredit mikronya—mampu menciptakan tambahan pendapatan 10% per tahun bagi peminjamnya. Studi ini melihat keberhasilan perempuan dalam memanfaatkan kredit mikro dan menemukan adanya korelasi yang kuat antara frekuensi pertemuan kelompok perempuan dan besarnya tunggakan cicilan kelompok itu. Dalam kultur masyarakat perdesaan, kaum perempuan dituntut untuk lebih banyak mengurus masalah-masalah domestiknya, sehingga mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran ini memungkinkan kaum perempuan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi *social coordination* bisa lebih sering terjadi. Peran ini pula membuat perempuan lebih memilih untuk memikirkan secara serius bagaimana membayar utang kepada kelompoknya, daripada menanggung rasa malu karena menunggak utang itu.

Kata kunci: Kemiskinan, Program Pemberdayaan Kecamatan (PPK), Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

ABSTRACT

This study evaluates implementation of society empowerment program in the East Java Province. that program is called KDP (Kecamatan Development Program). It is found that PPK has hit the target, that is poor district. The target precision is measured from physical condition of respondent house, which is connected positively with respondent income. It means that the more lower the respondent income, the more worse their house condition. At micro level, PPK through its micro credit, enables to create average additional income 10% per year for its borrower. This study observes a success of woman group in making use credit micro, and there is a strong Spearman relationship between frequency of the group meeting and the group default in credit. In the culture of rural society, many women are strongly demanded to take care of their domestic problems, so that they feel expensive to leave their house (let alone their village) for a long time. This role enables rural women to interact each other intensively within their group, so that social coordination within them could be realized. For a rural women with debt, running away from her group is more expensive than thinking seriously to pay her debt to her group.

Keywords: Poverty, District Empowerment Program, Saving & Debt Club for Women, Productive Economics Unit.

PENDAHULUAN

Ketika kebijakan pemerintah apapun telah diarahkan sedemikian rupa untuk menuju kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya, maka pertanyaan yang mendesak untuk segera dijawab adalah sejauhmanakah peningkatan kesejahteraan masyarakat atau meminjam istilah Meier (1995:7) yaitu *upward movement of the entire social system* telah terjadi sebagai akibat dari kebijakan itu. Macam pemerintahan apapun apakah pemerintahan di bawah seorang diktator atau pemerintahan demokratis,

pemerintahan di bawah seorang raja atau pemerintahan yang dikendalikan oleh dewan imam akan menempatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Tidak ada satu pemerintahan pun yang menginginkan masyarakatnya jatuh miskin, dan semua pemerintahan menginginkan masyarakatnya sejahtera.

Sebuah program pemerintah yang menjadi perhatian artikel ini adalah PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Cakupan wilayah pelaksanaannya

adalah 2.202 desa dalam 151 kecamatan dalam 27 kabupaten. PPK adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (c.q. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS)) untuk memberdayakan masyarakat perdesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan *a la* PPK ini dilakukan melalui: (a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (b) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (c) Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal; (d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (e) Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.

Secara lebih spesifik, program PPK ditujukan untuk: (a) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal; (c) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan; (d) Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat; (e) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Pendek kata, program PPK pada derajat tertentu adalah program pengguliran dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan (Keterangan lengkap tentang program PPK dapat dibaca dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PTO PPK), yang disusun oleh Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (2005). Pengalokasian dana PPK ini di antaranya adalah untuk pembangunan sarana/prasarana, untuk pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan untuk Simpan khusus Pinjam Perempuan (SPP).

Baik UEP maupun SPP merupakan kegiatan pengguliran dana (*revolving fund*) untuk membuat masyarakat miskin perdesaan lebih berdaya. Pemberdayaan di sini dapat dipahami sebagai ketersediaan pilihan (*choice*) bagi masyarakat miskin untuk (1) memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan *income* bagi dirinya, (2) meningkatkan derajat pendidikannya, dan (3) memelihara kesehatannya. Tiga poin ini pada gilirannya menuju peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat miskin perdesaan.

Sehubungan dengan UEP *vis-a-vis* SPP, ada dua pertanyaan dari studi ini, yaitu: "Berapa besarnya pengaruh pinjaman UEP terhadap peningkatan pendapatan pemanfaat dana UEP?"; dan "Berapa besar-

nya pengaruh pinjaman SPP terhadap peningkatan pendapatan pemanfaat dana SPP?"

Jawaban berikut analisisnya atas pertanyaan ini dapat saling dibandingkan, karena:

- Pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk UEP dikendalai oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana/prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk sarana/prasarana, semakin kecil ketersediaan dana untuk UEP. Sementara keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP.
- Pengorganisasian kelompok SPP relatif lebih mudah dibanding kelompok UEP. Untuk memenangkan dana UEP, masyarakat harus membentuk kelompok usaha bersama. Sedangkan pengorganisasian kelompok SPP lebih mudah dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal-baik formal maupun informal-yang sudah ada dalam masyarakat seperti kelompok jama'ah tahlil, kelompok dasa wisma, atau kelompok PKK.
- Kelompok SPP boleh mengakses dana PPK baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif seperti untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Sedangkan alokasi dana UEP diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang produktif.

Berbicara tentang SPP adalah berbicara tentang kaum perempuan. Sebuah topik yang selalu menarik dibicarakan oleh kaum lelaki normal. ada anggapan bahwa kaum perempuan lebih lemah-atau lebih tidak berdaya-dibanding kaum lelaki. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah jika melihat fakta adanya diferensiasi kerja antara kaum perempuan *vis-a-vis* kaum lelaki. Peran perempuan dalam sebuah perekonomian rumah tangga cenderung 'dibelakangkan,' dalam arti mereka hanya mengurus masalah masak-memasak dan cuci-mencuci. Sementara kaum lelaki dipercaya sebagai sumber pendapatan keluarga. Ketika kaum perempuan diberi kesempatan untuk mengakses dana PPK melalui kegiatan SPP, pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya adalah: "Bagaimanakah kinerja SPP (relatif dibandingkan dengan kinerja UEP)?"

Untuk memperoleh jatah pinjaman dana UEP maupun SPP, individu harus berkelompok dengan individu-individu lainnya. Untuk itu, adalah menarik kiranya dipertanyakan pula: "Adakah efek kelompok dalam kegiatan UEP maupun SPP?" Pertanyaan ini berdasarkan anggapan bahwa dengan 'memaksa' sebuah masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya menjadi beberapa kelompok-kelompok kecil, maka (1) akan terjadi persaingan di antara (*among*) satu kelompok dengan satu kelompok lainnya untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dalam mengelola dana

PPK; dan (2) akan tercipta mekanisme kontrol antara anggota satu dengan satu anggota lainnya di dalam (*within*) sebuah kelompok.

KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan dalam sebuah masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dinilai (*assessed*). Perkara ini muncul sejak tahun 1970an, ketika para pakar ekonomika mendapat kritikan tajam karena 'terlalu memuja' pendapatan (*income*) per kapita (GDP per kapita) sebagai indikator kemiskinan. GDP adalah kependekan dari *Gross Domestic Product*, yang mencerminkan kemampuan penduduk dalam wilayah/negara tertentu untuk menghasilkan *income*. Ia diindonesiakan menjadi PDB (= Produk Domestik Bruto).

Semakin kecil GDP per kapita yang dihasilkan oleh suatu masyarakat, maka semakin miskin masyarakat itu.

Kritikan tajam yang dialamatkan kepada pemuja GDP ini kemudian dijawab dengan memasukkan aspek harga lokal ke dalam GDP sehingga menjadi *purchasing power adjusted real GDP*. Pentransformasian GDP per kapita sehingga mencerminkan daya beli ini akan membuat GDP suatu wilayah menjadi *fair* jika dibandingkan dengan GDP wilayah (atau negara) lain.

GDP per kapita berdasarkan daya beli ini tidaklah serta-merta kemudian diratifikasi oleh semua sarjana. Indikator ini dianggap 'sangat ekonomi' sehingga tidak memberikan ruang bagi sarjana-sarjana non-ekonomi untuk berbicara tentang kemiskinan. Indikator ini dikatakan hanya mencerminkan kuantitas, dan tidak berbicara tentang kualitas hidup masyarakat. Dari sini kemudian lahir indikator alternatif untuk mengukur kemiskinan, yaitu *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau lebih dikenal sebagai *basic need approach*. PQLI adalah sebuah indikator kesejahteraan yang mempertimbangkan kecukupan sandang, kecukupan pangan, dan ketersediaan papan.

Cerita tentang perkembangan indikator kemiskinan belum berakhir. Ketika kita mengamati dan kemudian harus menjelaskan kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan uangnya, kecukupan sandang, pangan, dan kecukupan papan, kita kemudian disadari atau tidak akan segera mengaitkan 'apa yang terlihat' dengan anugerah-anugerah lainnya yang bersifat non-uang (non-ekonomi murni) dan non-fisik seperti kesehatan dan pendidikan. Apa yang kemudian sering terucap secara reflek dari mulut kita, misalkan, adalah: "Sayang, si Fulan kaya tetapi sakit-sakitan," atau "Aduh kasihan, dia kaya tetapi buta

huruf." Ucapan ini mengindikasikan persepsi kita bahwa si Fulan belum sepenuhnya kaya. GDP *an sich* gagal dalam menjelaskan kemiskinan.

Bank Dunia (UNDP) dalam sebuah laporannya tahun 1990, memperkenalkan *human development index* (HDI). HDI ini kemudian diindonesiakan menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu: lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot sepertiga); dan tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP rupiah). Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat; juga ditandai dengan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal itu selanjutnya akan meningkatkan produktivitas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak (Meier, 1995:7-32).

Uraian di atas menegaskan bahwa pendapatan masyarakat atau GDP, bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kemiskinan. Kemiskinan bukan lagi melulu bersangkut-paut dengan uang nominal yang diterima sebagai pendapatan (*income*). Ia tidak juga berbicara tentang ketersediaan sandang, pangan, papan. Ia harus pula mempertimbangkan aspek pendidikan dan aspek kesehatan.

Perdebatan mengenai bagaimana mengukur kemiskinan ternyata masih berlanjut. Sebuah aliran kecil yang menyeruak masuk ke dalam arus besar *welfare economics* adalah aliran yang menyatakan bahwa tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Bagi Indonesia pada umumnya dan masyarakat perdesaan pada khususnya, argumen ini dapat dipahami karena:

- Perempuan, dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung dugaan ini, bahwa wanita umumnya lebih menyukai televisi dari pada media cetak. Jumlah wanita yang menjadi konsumen televisi adalah 52,7% dibandingkan dengan konsumen surat kabar atau majalah yang hanya 15,7%. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, seperti masa tanam dan masa panen.
- Oleh karena perempuan lebih banyak bekerja di sektor domestik, maka mereka lebih banyak

mengetahui kebutuhan nutrisi dan kesehatan bagi keluarganya.

- Adanya kendala (*constraint*) bagi perempuan untuk mengakses kredit kecil (*microfinance*) untuk usaha. Banyak laporan yang menyatakan bahwa perempuan sering menjadi *market target* dari rentenir (*moneylenders*), tukang gadai (*pawnbrokers*), dan penjual barang-barang kebutuhan rumah tangga (seperti: sandang dan peralatan dapur) dengan fasilitas kredit.

Usaha untuk menangkap semua indikator kemiskinan yang dicontohkan di atas tentunya bukanlah tanpa tantangan. Tantangan berikutnya yang segera menghadang adalah bagaimana mengukur kemiskinan dan sejauhmana ketersediaan data kemiskinan. Meskipun demikian, studi ini “*should not prevent us from making use of whatever data may be easily available already*” (Sen, 1985:73).

Konsekuensi dari kemiskinan adalah tidak adanya pilihan bagi penduduk miskin (*poverty giving most people no option*) untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar, misalkan (1) kebutuhan pendidikan; (2) kesehatan; dan (3) kebutuhan ekonomi-kepemilikan alat-alat produksi yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan.

Kondisi demikian menimbulkan rangkaian-rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Nurkse (dalam Sukirno, 1981:218) mengatakan bahwa suatu negara adalah miskin karena memang miskin (*a country is poor because it is poor*). Ia menjelaskannya dengan

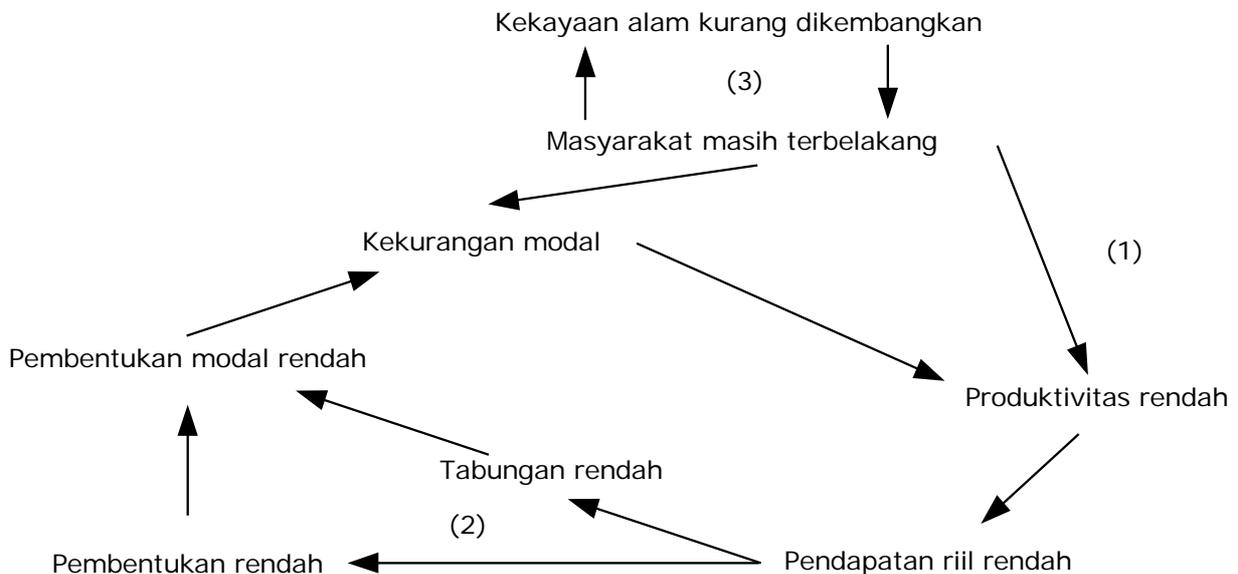
konsep lingkaran ‘setan’ kemiskinan atau lebih dikenal sebagai *vicious circles of poverty* seperti pada Gambar 1.

Lingkaran setan kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal. *Pertama*, penawaran modal. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah. *Kedua*, permintaan modal. Di negara miskin keinginan untuk menanamkan modal rendah. Hal ini lebih disebabkan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Di samping itu, pendapatan masyarakat juga rendah yang diakibatkan produktivitas mereka rendah.

Pernyataan “*a country is poor because it is poor*” sungguh sangat menyedihkan. Sebuah pernyataan yang tidak berujung pangkal bahwa ia miskin karena tidak punya apa-apa, dan tidak punya apa-apa menyebabkan ia menderita kemiskinan. Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para sarjana untuk ‘memotong’ lingkaran setan kemiskinan di Indonesia, yaitu:

1. Menggali potensi kekayaan alam.
2. Meningkatkan produktivitas kerja.
3. Menggiatkan masyarakat untuk menabung.
4. Memberikan pinjaman untuk modal usaha.

Menggali Potensi Kekayaan Alam. Indonesia dikenal luas memiliki kekayaan alam yang sangat



Gambar 1, Lingkaran 'setan' kemiskinan (*vicious circles of poverty*)

potensial. Lautannya yang penuh dengan berbagai macam spesies ikan, daratannya yang kaya dengan hasil-hasil hutan, dan perut buminya yang penuh dengan sumberdaya energi dan mineral. Apakah eksplorasi kekayaan alam dapat secara langsung ‘menyentuh’ masyarakat miskin? Jawabannya mungkin “Tidak,” kecuali penggalian potensi kekayaan laut yang dapat secara langsung melibatkan masyarakat miskin di daerah pesisir. Sulit sekali untuk mengatakan bahwa penggalian potensi hutan dan perut bumi dapat menyentuh langsung masyarakat miskin. Pemanfaatan hasil hutan dan perut bumi mensyaratkan modal besar—yang jelas-jelas tidak dimiliki oleh kaum miskin.

Meningkatkan Produktivitas Kerja. Dalam konteks masyarakat miskin di sektor pertanian, produktivitas mengacu kepada bagaimana meningkatkan hasil usaha tani. Upaya ini bisa dilakukan oleh pemerintah, misalkan, dengan mendorong para petani untuk melakukan mekanisasi dalam pemrosesan lahan pertanian, atau dengan membangun sarana/prasarana (sistem irigasi, misalkan) untuk menunjang lahan pertanian. Upaya ini tentu dapat meningkatkan hasil tani, tetapi ia sangat sektoral yang hanya menyentuh pemilik lahan pertanian. Lebih dari itu, upaya ini tidak menyentuh langsung buruh tani dan/atau masyarakat miskin perdesaan yang tidak mempunyai lahan.

Menggiatkan Masyarakat untuk Menabung. Tabungan (*saving*) dapat dimaknai, dalam arti sempit, sebagai bagian dari pendapatan uang yang pembelanjaannya disimpan/ditunda sampai di kemudian hari. Jika tabungan disimpan dalam sebuah bank, maka ia dapat menciptakan pendapatan bagi pihak lain. Dalam sistem perbankan, tabungan atas nama pihak deposan menjadi dana bank untuk disalurkan kepada pihak debitur dalam bentuk kredit. Jika kredit ini dipakai oleh debitur untuk membiayai kegiatan usaha produktifnya, maka ia bisa menciptakan keuntungan bagi debitur dan memberikan pendapatan bagi para tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha itu.

Masalahnya adalah bahwa masyarakat miskin, dari definisinya, tidak mempunyai sisa pendapatan untuk ditabung. Memikirkan uang untuk dibelanjakan hari ini saja sudah setengah mati, apalagi memikirkan uang untuk ditabung. Kalaupun mereka ingin mengakses dana pinjaman dari bank, mereka akan terbentur oleh kolateral. Mereka tidak mempunyai tabungan karena miskin, dan tidak dapat meminjam dana bank karena miskin pula.

Memberikan Pinjaman untuk Modal Usaha. Tidak adanya pembentukan modal dalam masyarakat perdesaan bisa disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, mereka masih belum memahami manfaat dan arti pentingnya lembaga keuangan dalam memobilisasi

dana-dana tabungan. Sebagai misal, kita sering melihat masyarakat perdesaan menabung dengan cara menyimpan uangnya ‘di bawah bantal,’ memelihara tanah persawahan, memelihara ternak, atau membeli perhiasan. *Kedua*, mereka ingin memanfaatkan peluang untung dari sebuah usaha produktif yang digagasnya, tetapi mereka dikendalikan oleh ketersediaan modal.

METODOLOGI

Studi ini diawali dengan perancangan kuesioner untuk memprofilkan tingkat kemiskinan responden pemanfaat dana PPK, yang tergabung dalam kelompok-kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan khusus Pinjam Perempuan (SPP). Tingkat kemiskinan di-*proxy* dari pengeluaran responden dan kondisi rumah responden. Dalam kuesioner ini, ada tiga jenis data yang diolah, yaitu: (a) data dengan skala ordinal, (b) data dengan skala interval, dan (c) data dengan skala rasio (perbandingan).

Wawancara dilakukan pada sekitar bulan Oktober dan November 2006. Setelah data primer diperoleh dari 269 responden UEP (yang semuanya berjenis kelamin lelaki) dan 274 responden SPP (yang semuanya berjenis kelamin perempuan) yang tersebar di 27 kabupaten di Jawa Timur, data itu kemudian ditabulasi secara deskriptif dan dianalisis dengan metode regresi. Tabulasi atau deskripsi data ini utamanya untuk memprofilkan tingkat kemiskinan responden. Sedangkan analisis regresi—yaitu *ordinary least square* (OLS)—untuk mengukur arah (*sign*) hubungan dan besarnya (*magnitude*) hubungan di antara dua variabel yang menjadi perhatian studi ini.

Untuk mendapatkan variabel kemiskinan (bukan kekayaan), studi ini melakukan sebuah *trick*. Misalkan pendapatan (*income*) per tahun yang didapat oleh Eko, Budi, Badu, dan Amin masing-masing adalah Rp1000, Rp800, Rp500, dan Rp400, di mana urutannya menunjukkan bahwa angka terbesar adalah terkaya (Eko) dan angka terkecil adalah termiskin (Amin). Kami ingin mengatakan sebaliknya, yaitu angka terbesar adalah termiskin dan angka terkecil adalah terkaya. Oleh karena itu, urutan angka milik Eko, Budi, Badu, dan Amin masing-masing ditempatkan sebagai pembagi (*denominator*) terhadap angka satu (*numerator*) sehingga secara berurutan menjadi $0,001 (= \frac{1}{1000})$, $0,00125 (= \frac{1}{800})$, $0,002 (= \frac{1}{500})$, dan $0,0025 (= \frac{1}{400})$. Jadi, angka terbesar (0,0025) adalah termiskin (Amin) dan terkecil (0,001) adalah terkaya (Eko). Dalam kata lain, data kekayaan di-*reverse* menjadi data kemiskinan.

Dalam kasus tertentu, analisis regresi tidak dapat dilakukan karena salah satu atau kedua datanya adalah berskala ordinal (*ordinal-scaled*). Sungguhpun analisis regresi tidak dapat digunakan untuk data-data ordinal, kekuatan (*strength*) dan arah hubungan di antara dua variabel ordinal masih bisa dihitung dengan *Spearman rank correlation*.

Sebagai contoh, misalkan ada dua data: pendapatan responden (X) dengan *interval scale* dan kondisi fisik rumah responden (y) dengan *ordinal scale*. Untuk mendapatkan koefisien *Spearman rank correlation*, kita harus ‘mengordinalkan’ data pendapatan responden. Misalkan ada 8 responden dengan pendapatan yang terkecil Rp.430 dan yang terbesar Rp.620. Yang terkecil diberi *rank* 1 dan yang terbesar diberi *rank* 8. Setelah angka yang terbesar dan terkecil ‘dikunci’ masing-masing dengan *rank* 1 dan 8, pendapatan enam responden yang berada di antara keduanya diberi *rank* 2, 3, 4, 5, 6, 7, sesuai dengan besarnya pendapatan rupiahnya. Simbolkan hasil pentransformasian data pendapatan ini—yaitu dari data interval menjadi data ordinal—sebagai x .

Koefisien *Spearman rank correlation* (r_s) dihitung dengan formula:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

di mana $d_i = x_i - y_i$, yaitu perbedaan antara setiap pasangan peringkat. Untuk menyatakan apakah tingginya x mengindikasikan tingginya y , kita harus membandingkan antara r_s dengan *critical value of the Spearman rank correlation coefficient*. Jika, pada tingkat keyakinan tertentu, r_s lebih besar (kecil) dari nilai kritisnya, maka besarnya x (tidak) mencerminkan besarnya y .

PEMBAHASAN

Hubungan antara Pinjaman dengan Kemiskinan

Kami hendak menganalisis hubungan kegiatan PPK dengan keMISKINan berdasarkan data primer yang sudah dihimpun melalui kuesioner. Pertanyaan besar yang hendak dijawab di sini adalah tentang sejauhmana usaha masyarakat dalam memanfaatkan dana PPK melalui kegiatan UEP dan SPP, berpengaruh terhadap kesejahteraan bagi pemanfaat dana UEP dan SPP. Dalam kalimat lain, studi ini ingin mencari tahu apakah pinjaman dalam kerangka UEP dan SPP dapat meredakan keMISKINan.

Disyaratkan (atau dipaksakan) kepada pemanfaat dana UEP maupun SPP untuk berkelompok sebelum mengajukan dana pinjaman. Untuk UEP, keanggotaan kelompoknya bisa berjenis kelamin sama, sedangkan keanggotaan SPP harus berjenis kelamin perempuan. Adalah menarik jika studi ini menguji ada tidaknya ‘efek jender’ dalam PPK.

Dalam analisis regresi berikut ini, yang menjadi variabel terikat adalah *MISKIN*, yaitu besarnya pendapatan responden yang di-*reverse*. Sedangkan yang menjadi variabel bebasnya adalah besarnya *PINJAM*an (dalam kerangka UEP atau SPP) yang sudah dianalisis. Misalkan, pinjaman Rp500.000 berjangka waktu 6 bulan disamakan dengan Rp1.000.000 berjangka waktu 1 tahun. Ini dilakukan untuk menyeragamkan periode *kecilnya* pendapatan (atau *besarnya* keMISKINan) dan periode *besarnya* *PINJAM*an. Hipotesis kami adalah bahwa pemberian *PINJAM*an, baik untuk kegiatan UEP atau SPP, akan mengurangi keMISKINan (atau menambah *income*).

Hubungan antara total *PINJAM*an kelompok UEP dengan tingkat keMISKINan adalah sebagai berikut:

$$MISKIN_{UEP} = -12,22 - 0,06PINJAM_{kelompok} \quad (1)$$

(16,75) (1,38) $R^2 = 0,007$

dengan $n = 269$ responden UEP. Secara teoritis, persamaan (1) ini mempunyai *sign* yang benar dan *magnitude* yang cukup masuk akal. *PINJAM*an yang diterima kelompok UEP, dapat menurunkan keMISKINan kelompok UEP itu pada derajat signifikansi 90% (karena $t_{hitung} > t_{tabel}$). Ini berarti jika sebuah kelompok UEP meminjam dana PPK sebesar Rp1.000.000, maka peningkatan pendapatan karena dana pinjaman ini adalah sebesar Rp.60.000 (= Rp1.000.000 x 0,06).

Hubungan antara total *PINJAM*an kelompok SPP dengan tingkat keMISKINan adalah sebagai berikut:

$$MISKIN_{SPP} = -11,23 - 0,12PINJAM_{kelompok} \quad (2)$$

(15,64) (2,83) $R^2 = 0,02$

dengan $n = 274$ responden SPP. Dilihat dari perspektif ekonomika, persamaan (2) ini mempunyai *sign* yang benar dan *magnitude* yang cukup masuk akal. 1 unit *PINJAM*an yang diterima kelompok SPP, dapat menurunkan keMISKINan kelompok SPP itu sebesar 0,12 unit pada derajat kesalahan sebesar 0,5% (karena $t_{hitung} > t_{tabel}$). Ini berarti jika sebuah kelompok SPP meminjam dana PPK sebesar Rp1.000.000, maka peningkatan pendapatan karena dana pinjaman ini adalah sebesar Rp.120.000 (= Rp1.000.000 x 0,12).

Mari disimak dan dibandingkan persamaan (1) dengan persamaan (2). Tampak bahwa ada *gender effect* karena besarnya kontribusi *PINJAMAN* kelompok dalam kerangka SPP (0,12) adalah lebih besar dibanding dalam kerangka UEP (0,06). Dengan memanfaatkan dana pinjaman PPK, SPP yang beranggotakan para perempuan lebih mampu menghasilkan pendapatan dibanding UEP yang beranggotakan para lelaki.

Mengapa SPP yang beranggotakan perempuan lebih berdampak terhadap penurunan kemiskinan, ketimbang kelompok UEP yang beranggotakan lelaki? Studi ini menelisik lebih jauh untuk mencari tahu mengapa SPP lebih produktif dibanding UEP. Ada dua hal yang kami duga bisa menjelaskan perbedaan ini yaitu faktor tunggakan dan faktor beban utang.

Faktor Tunggakan. Kita harus ingat bahwa dana UEP adalah *revolving fund*. Artinya, ketika saya—sebagai nasabah peminjam dana UEP—menunggak pembayaran cicilan, maka keinginan anda untuk memanfaatkan dana ini akan tertunda untuk diwujudkan. Semakin lama umur tunggakan saya, semakin besar jumlah tunggakan saya, lebih-lebih semakin banyak orang lain yang menunggak, maka semakin tertunda keinginan anda akan terwujud. Data kami menunjukkan bahwa peristiwa tunggakan lebih sering terjadi dalam pengguliran dana UEP ketimbang dana SPP (lihat Tabel 1). Tampaknya, faktor tunggakan ini saling berkaitan dengan faktor beban pinjaman.

Tabel 1. Tunggakan Responden UEP dan Responden SPP

	Pernah	Tidak pernah	Jumlah
Responden UEP	34 (12%)	249 (88%)	283 (100%)
Responden SPP	24 (8,2%)	268 (91,8%)	292 (100%)

Faktor Beban Utang. Tabel 2 melaporkan bahwa ada 17,37% responden UEP dan 14,72% responden SPP mempunyai pinjaman di tempat lain (misalkan, di BPR atau koperasi). Kalau saya meminjam dana UEP sekaligus dana dari bank atau koperasi misalkan, maka kemungkinan saya untuk menunggak pembayaran cicilan akan semakin besar. Dalam kata lain, semakin banyak utang saya, semakin saya terbebani, dan semakin besar kemungkinan saya untuk menunggak pembayaran cicilan dana UEP. Jika demikian, jika anda ingin memanfaatkan dan UEP, waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dana ini menjadi semakin lama.

Tabel 2. Beban Utang Responden UEP dan Responden SPP

	Ya	Tidak	Jumlah
Responden UEP	49 (17,37%)	233 (82,62%)	282 (100%)
Responden SPP	43 (14,725)	249 (85,27%)	292 (100%)

Dibanding dana UEP, telah terbukti secara empiris bahwa dana SPP lebih besar kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan (atau peningkatan pengeluaran). Kontribusi ini, sebagaimana dijelaskan di atas—ternyata berkaitan dengan kinerja cicilan dan beban utang nasabah. Kinerja cicilan SPP lebih baik daripada UEP, dan beban utang nasabah UEP lebih tinggi dibanding nasabah SPP.

Dua 'penjelas' ini tampaknya saling berkaitan—jika kami tidak ingin mengatakan saling mengunci (*interlock*). Semakin tinggi beban utangnya, semakin tinggi kemungkinannya untuk menunggak pembayaran cicilan utang itu. Sebaliknya, semakin lama umur dan besar tunggakannya, semakin berat beban utangnya. Fenomena ini terjadi dalam UEP, tidak (atau mungkin belum) dalam SPP.

Dua penjelas ini, saling berkaitan dan secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap lamanya 'waktu tunggu' bagi pihak lain jika hendak mengakses dana UEP. Anggaplah saya sebagai anggota kelompok UEP bernama "Sejahtera," dan anda sedang mengantri untuk mendapatkan jatah pengguliran dana UEP yang terbatas dan kompetitif. *You depend on me*. Asumsikan bahwa saya menunggak pembayaran cicilan.

Semakin lama umur tunggakan cicilan UEP yang harus saya bayarkan, semakin besar jumlah tunggakan itu, lebih-lebih semakin banyak nasabah UEP lain (tidak hanya saya) yang menunggak, maka semakin lama waktu tunggu anda untuk mewujudkan impian anda untuk mendapatkan dana pinjaman UEP. Di samping itu, semakin banyak utang saya, semakin saya terbebani, maka semakin besar kemungkinan saya untuk menunggak pembayaran cicilan dana UEP sedemikian rupa sehingga semakin besar kemungkinan lamanya waktu untuk mengantri dana UEP.

Kami yakin bahwa hampir semua orang tidak betah untuk menunggu. Katanya, *waiting is boring*. Ketika anda menunggu, dan anda tidak mempunyai pilihan lain, maka anda akan menyabarkan diri untuk menunggu. Tetapi, jika tersedia pilihan alternatif, dan anda didesak oleh kebutuhan—apalagi 'keinginan'—maka anda cenderung bersusah payah untuk mengakses pilihan itu. Pilihan alternatif yang dimaksud di sini adalah dana SPP. Daripada anda menunggu lama untuk mendapatkan dana UEP, anda mencoba mengantri di SPP.

Di samping 'alasan psikologis' di atas, ada beberapa 'alasan rasional' mengapa dana SPP lebih diminati ketimbang dana UEP, yaitu:

- Pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk UEP dikendalainya oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana/prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk sarana/

prasarana, semakin kecil ketersediaan dana untuk UEP. Sementara keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP.

- Pengorganisasian kelompok SPP relatif lebih mudah dibanding kelompok UEP. Untuk memenangkan dana UEP, masyarakat harus membentuk kelompok usaha bersama. Sedangkan pengorganisasian kelompok SPP lebih mudah dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal—baik formal maupun informal—yang sudah ada dalam masyarakat seperti kelompok jama'ah tahlil, kelompok dasa wisma, atau kelompok PKK.
- Kelompok SPP boleh mengakses dana PPK baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif seperti untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Sedangkan alokasi dana UEP diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang produktif.

Alasan-alasan di atas memunculkan gagasan untuk membandingkan UEP *vis-a-vis* SPP. Untuk maksud membandingkan UEP *vis-a-vis* SPP dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan, studi ini menetapkan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Tingkat kemudahan untuk memenangkan dana melalui kompetisi, yang dikontrol oleh (2) Tingkat kesulitan untuk memenuhi segala persyaratan dalam mengakses dana; (3) Tingkat keuntungan berkelompok dalam UEP atau SPP, yang dikoreksi dengan (4) Tingkat kebaikan karena ada/tidaknya simpanan kelompok; dan (5) Besarnya prospek karena adanya perbedaan dalam batasan peruntukkan dana.

Ini adalah lima kriteria yang digunakan untuk membandingkan UEP terhadap SPP, yang dihirarkikan dalam Gambar 2. Gambar itu menunjukkan peran PPK dalam penyaluran dana bergulir dilihat dari sisi kemudahan untuk mendapatkan dana, kesulitan masyarakat untuk memenuhi persyaratan, keuntungan masyarakat bila bergabung dengan SPP atau UEP,

kebaikan yang diterima masyarakat bila bergabung dengan UEP atau SPP, serta prospektif UEP atau SPP di masa depan.

Melalui penghitungan dengan prosedur *analytic hierarchy process* (AHP), hasilnya dilaporkan dalam Tabel 3.

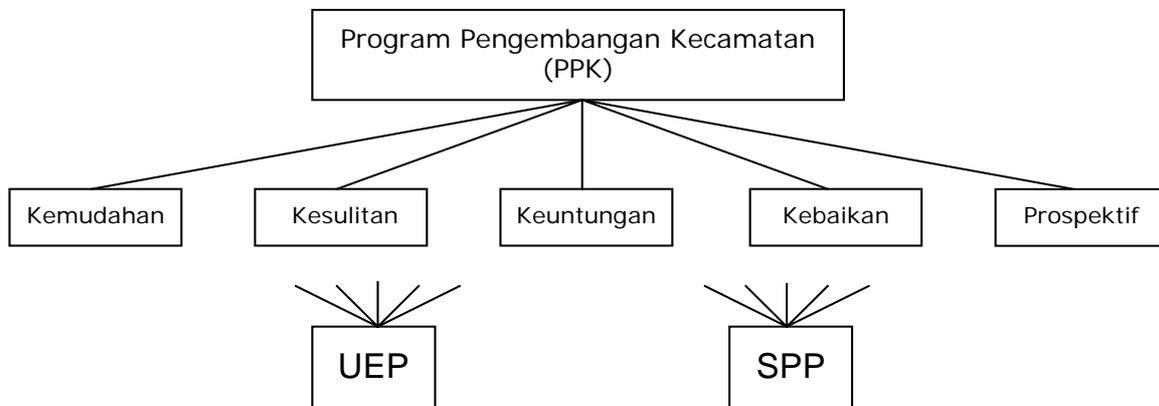
Tabel 3. Bobot UEP atau SPP sehubungan dengan Kriteria

	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	1
	Kemudahan	Kesulitan	Keuntungan	Kebaikan	Prospektif	Bobot Total
UEP	0.350	0.595	0.444	0.353	0.522	0.415
SPP	0.650	0.405	0.556	0.647	0.478	0.585

Tabel 3 menjelaskan bahwa dalam hal mudah tidaknya untuk memenangkan dana *via* kompetisi, tingkat kemudahan SPP (65%) lebih unggul dibanding UEP (35%). Dalam hal persyaratan untuk mendapatkan dana, tingkat kerumitan UEP (59,5%) lebih tinggi dibanding SPP (40,5%). Dalam hal mana yang lebih menguntungkan, tingkat keuntungan SPP (55,6%) lebih tinggi dibanding UEP (44,4%). Dalam hal mana yang lebih baik, apakah berkelompok *a la* UEP atau SPP, SPP lebih baik dibanding UEP. Sedangkan dalam hal mana yang lebih “menjanjikan” di masa depan, UEP lebih prospektif dibanding SPP.

Mana yang lebih disukai menurut *seluruh* kriteria? AHP menghitung bahwa yang memenuhi keseluruhan kriteria (kemudahan, kesulitan, keuntungan, kebaikan, dan prospektif) adalah SPP dengan *weight* 0,585 sementara UEP *weight*-nya 0,415.

Temuan ini cukup menguatkan alasan mengapa masyarakat lebih meminati dana SPP ketimbang dana UEP. Selain itu, perbedaan angka-angka dalam Tabel 3 dapat menunjukkan keunggulan-keunggulan komparatif UEP *vis-a-vis* SPP. Secara umum (*global*), masyarakat lebih meminati dana SPP ketimbang UEP.



Gambar 2. Kriteria Perbandingan UEP versus SPP

Pengaruh Berkelompok

Semua sarjana ilmu sosial sepakat bahwa manusia cenderung berkelompok dengan manusia lainnya. Berkelompok bisa dilakukan secara sukarela (seperti menjadi anggota partai politik di negara demokratis), atau secara paksaan (seperti sekumpulan tahanan dalam blok sel penjara). Kelompok bisa dibentuk secara informal (seperti kelompok pengajian) atau secara formal (seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). Kelompok bisa terbentuk secara spontan (seperti kelompok suporter sepak bola di sebuah tribun lapangan sepak bola), atau *organized* (seperti kelompok demonstran). Kami hendak mengatakan bahwa setiap kelompok memiliki tujuan, apapun macam atau jenis sebuah kelompok dan bagaimanapun kelompok itu terbentuk, mulai dari berkelompok untuk melindungi anggota-anggotanya dari serangan binatang buas atau berkelompok untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu.

Salah satu keunikan PPK adalah adanya persyaratan bagi calon peminjamnya untuk berkelompok untuk memenangkan dana UEP dan SPP. Keanggotaan kelompok dalam UEP maupun SPP tidak bersifat paksaan atau 'sekedar' kumpul-kumpul. Baik kelompok UEP maupun SPP mempunyai satu tujuan yaitu memenangkan dana pinjaman PPK untuk dibagikan kepada anggota-anggotanya dan kemudian mempertanggungjawabkan dana pinjaman itu secara berkelompok.

Meskipun kelompoknya adalah informal dan keanggotaannya bersifat sukarela, tetapi segera setelah anda mendapatkan pinjaman PPK *via* kelompok, maka anda tidak dapat lari (*exit*) dari kelompok itu sebelum anda melunasi pinjaman itu. Anda berada dalam situasi asosiatif yang memaksa anda (dan juga teman-teman anda dalam kelompok anda) untuk mengkoordinasikan diri dalam 'pola transaksi utang-piutang' sebagai berikut:

- Jika anda mendapatkan pinjaman, maka anda harus melunasinya di kemudian hari.
- Jika anda menunggak pembayaran cicilan, sampai batas waktu tertentu, anda dibolehkan untuk menunda pembayaran cicilan, atau anda akan didenda.
- Jika sampai batas waktu tertentu anda masih menunggak, anda akan ditagih secara intensif.
- Jika anda dinyatakan tidak mampu lagi mencicilnya atau melunasinya, maka kelompok akan menanggunanya.

Realitas dalam transaksi utang-piutang selalu menampakkan sifat memaksa (*imperative*) dan tegas-yaitu 'utang harus dibayar'-sedemikian rupa sehingga menempatkan semua anggota kelompok UEP atau SPP tertentu dalam sebuah *imperatively coordinated association*.

Basis pembentukan kelompok UEP secara seksual berbeda dengan kelompok SPP. Keanggotaan UEP terdiversifikasi secara jenis kelamin, sedangkan anggota kelompok SPP haruslah berjenis kelamin perempuan. Kami hendak mengatakan bahwa sebuah kelompok SPP tertentu lebih mampu mengkoordinasikan dirinya secara *imperative* dibanding sebuah kelompok UEP tertentu. Argumen ini berdasarkan fakta dalam Tabel 4 dan 5

Tabel 4. Hubungan antara Frekuensi Kehadiran dalam Kelompok UEP dengan Frekuensi Tunggakan

UEP		Tunggakan	Hadir dalam pertemuan	
Spearman's rho	Tunggakan	Correlation coefficient	1.000	-.154*
		Sig. (2-tailed)	-	.011
		N	284	272
	Hadir dalam pertemuan	Correlation coefficient	-.154*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.011	-
		N	272	272

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)

Sumber; data primer, diproses oleh program SPSS 10.

Tabel 4 dapat dibandingkan dengan Tabel 5. Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan kelompok berkorelasi negatif dengan frekuensi tunggakan. Artinya, semakin sering hadir dalam pertemuan kelompok, semakin kecil kemungkinan menunggak. Korelasi antara frekuensi kehadiran dalam pertemuan dengan frekuensi tunggakan, ternyata lebih kuat dalam SPP dibanding dalam UEP.

Dibanding kelompok UEP, kelompok SPP lebih mampu memaksa anggota-anggotanya untuk membayar. Frekuensi kehadiran kelompok anggota UEP mempunyai *Spearman correlation* dengan frekuensi tunggakan sebesar -0,154 (lihat Tabel 4). Sedangkan frekuensi kehadiran kelompok anggota SPP mempunyai *Spearman correlation* dengan frekuensi tunggakan sebesar -0,208 (lihat Tabel 5). Ini berarti kekuatan *group coordination* dalam memperkecil tunggakan, adalah lebih bekerja (*imperative*) dalam SPP ketimbang dalam UEP.

Tabel 5. Hubungan antara Frekuensi Kehadiran dalam Kelompok SPP dengan Frekuensi Tunggalan

SPP		Tunggalan	Hadir dalam pertemuan	
Spearmen's rho	Tunggalan	Correlation coefficient	1.000	-.208**
		Sig- (2-tailed)	-	.000
		N	292	272
	Hadir dalam pertemuan	Correlation coefficient	-.2088**	1.000
		Sig- (2-tailed)	.000	-
		N	283	183

* Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)

Sumber; data primer, diproses oleh program SPSS 10.

Mengapa *group coordination* dalam SPP sedemikian *imperative*? Ada dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu:

1. Kita semua sepakat bahwa dalam kultur masyarakat perdesaan, kaum perempuan dituntut untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah untuk menyelesaikan masalah-masalah domestiknya. Perempuan diminta untuk menyiapkan sarapan pagi sebelum suaminya keluar rumah mencari nafkah, hingga menyiapkan air mandi hangat untuk menyambut kedatangan suaminya di sore/malam hari. Kaum perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang lebih besar dibanding kaum laki-laki. Perasaan bertanggung jawab ini membuat mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran domestik ini memungkinkan kaum perempuan perdesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi *social coordination* bisa lebih sering terjadi. Jika ibu Fatimah mempunyai peran domestik yang besar dalam rumah tangganya sehingga mobilitasnya menjadi rendah dan perjumpaannya dengan anggota kelompoknya tidak begitu sulit, maka tanggungan utang/cicilannya akan semakin membebani psikologisnya. Sulit bagi Fatimah untuk bersembunyi sehari-hari di dalam rumah karena takut ditagih, sementara ia paling tidak harus belanja di pasar pagi. Sulit juga bagi Fatimah untuk tidak menghadiri undangan rapat kelompok di malam hari dengan alasan ia merasa capek setelah bekerja lembur sehari-hari.
2. Kita pasti juga sepakat bahwa perasaan perempuan umumnya lebih sensitif dibanding pria. Perempuan, pada umumnya, lebih peka terhadap masalah-masalah domestiknya dibanding laki-laki. Perempuan lebih tahu dan peka terhadap kebutuhan sandang dan biaya sekolah anaknya,

kebutuhan gizi dan kesehatan keluarganya, dan terhadap tingkat kebersihan lingkungan rumahnya. Kepekaan ini biasanya terlatih dan terbawa secara turun temurun (*historically transmitted*), utamanya dari ibu kepada anak perempuannya dan kemudian kepada cucu perempuannya.

Ketika 'para perempuan semacam ini' diletakkan dalam sebuah kelompok tertentu, maka pada derajat tertentu jiwa perasanya terbawa dan terpelihara dalam kelompok itu. Tentu saja 'derajat perasanya' yang terpelihara tergantung pada macam kelompoknya. Ibu Fatimah akan lebih memelihara perasaannya dalam kelompok lokal-kultural (seperti jama'ah tahlil, jama'ah yasin, atau jama'ah diba'), dibanding dalam kelompok rasional (seperti partai politik atau organisasi profesi yang beranggotakan para perempuan).

Kebanyakan kelompok SPP terbentuk secara lokal-kultural, sehingga dimungkinkan terjadinya fungsi kontrol yang dapat menyentuh perasaan perempuan. Misalkan, jika ibu Fatimah belum membayar cicilan, rekan kelompoknya mungkin tidak menagihnya secara eksplisit, melainkan dengan sindiran. Kalaupun ditagih secara eksplisit, rekan-rekan kelompoknya mungkin berujar (dalam bahasa Jawa): "Ayo bu, ndang dibayar!" Atau, "Duso lho nek gak dibayar!" Bagi ibu Fatimah, sindiran atau ujaran-ujaran semacam ini, bisa mengintimidasi perasaannya dan membangkitkan rasa malu atau *sungkan*, sedemikian rupa sehingga cukup memaksa ia memikirkan cara bagaimana membayarnya.

PENUTUP

Di bawah *setting* pelaksanaan *revolving fund* oleh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Jawa Timur, studi ini menyoal bagaimanakah kinerja peminjam dana PPK yang tergabung dalam kelompok UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dibandingkan dengan kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Studi ini secara sengaja memilih responden UEP yang berjenis kelamin laki-laki, meskipun aturan main PPK mengizinkan UEP beranggotakan perempuan, dan ternyata UEP didominasi oleh kaum laki-laki. Untuk melihat efek jender, "kinerja" responden UEP ini kemudian dibandingkan dengan responden SPP yang beranggotakan kaum perempuan.

Dilihat dari segi produktifitas pinjaman, pinjaman perempuan (SPP) lebih mampu mengentaskan kemiskinan ketimbang pinjaman laki-laki (UEP). Hal ini disebabkan (1) Kinerja tunggakan SPP lebih baik ketimbang UEP, dan (2) Pemanfaat dana UEP lebih terbebani utang ketimbang pemanfaat dana SPP. Dua

'penjelas' ini tampaknya saling berkaitan. Semakin tinggi beban utangnya, semakin tinggi kemungkinannya untuk menunggak pembayaran cicilan utang itu. Sebaliknya, semakin lama umur dan besar tunggakannya, semakin berat beban utangnya.

Studi ini melihat bahwa perempuan juga mampu secara kolektif mengkoordinasikan kaumnya untuk berkinerja lebih baik dalam pengelolaan pinjamannya. Karena, kaum perempuan mempunyai tanggung jawab domestik yang lebih besar dibanding kaum laki-laki. Perasaan bertanggung jawab ini membuat mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desanya. Peran domestik ini memungkinkan kaum perempuan perdesaan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi *social coordination* bisa lebih sering terjadi.

Di samping itu, perasaan perempuan umumnya lebih sensitif dibanding pria. Kepekaan ini biasanya terlatih dan terbawa secara turun temurun (*historically transmitted*), utamanya dari ibu kepada anak perempuannya dan kemudian kepada cucu perempuannya. Ketika 'para perempuan semacam ini' diletakkan dalam sebuah kelompok tertentu—yang berbasis lokal-kultural, maka pada derajat tertentu jiwa perasanya terbawa dan terpelihara dalam kelompoknya. Dalam kelompok semacam ini, dimungkinkan terjadinya fungsi kontrol (dengan sindiran, misalnya) yang dapat menyentuh perasaan perempuan. "Tekanan psikologis" dalam kelompoknya akan cukup memaksa para perempuan dalam kelompok itu untuk lebih memikirkan bagaimana membayar cicilan utang, daripada menunggak cicilan atau bahkan mengemplang pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Geertz, C., 197), *Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books.
- Hofstede, G., 1994, *Cultures and Organizations: Software of the Mind*, London: Harper-CollinsPublisher.
- Keller, G., B. Warrack, and H. Bartel, 1990, *Statistics for Management and Economics: A Systematic Approach*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Meier, G. M., 1995, *Leading Issues in Economic Development*, New York: Oxford Univ. Press.
- Saaty, T. L., 1992, *Multicriteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process*, Pittsburgh: RWS Publications.
- Sen, A. K., 1985, *Commodities and Capabilities*, Hennisman Lectures in Economics, Vol. 7, Amsterdam: North-Holland.
- Soekanto, S., 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi 4, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada.
- Sukirno, S., 1981, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: Penerbit FE UI
- Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan, 2005, *Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PTO PPK)*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Trainer, T., 2002, "Development, Charity and Poverty: The Appropriate Development Perspective," *International Journal of Social Economics*, Vol. 29, No. 1/2, hal. 54-72.